

ABSTRAK

Penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan jasa konstruksi diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian pekerjaan yang dimilikinya kepada pihak lain (subkontraktor) dengan persetujuan pengguna barang/jasa. Alasan Pengalihan sebagian pekerjaan yang dimiliki penyedia jasa/kontraktor utama yaitu dikarenakan pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian khusus (spesialis), selain itu untuk memenuhi syarat-syarat dan standar pekerjaan konstruksi yang kompleks. Bentuk pengalihan pekerjaan tersebut ditempuh melalui mekanisme subkontrak. Pengalihan pekerjaan ini diutamakan diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau perusahaan dengan skala yang lebih kecil dari kontraktor utama. Adanya pola kemitraan melalui subkontrak ini sebagai instrumen pemberdayaan UMKM disektor jasa konstruksi. Tujuannya agar UMKM dapat berperan serta dan meningkatkan kemampuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dalam pekerjaan konstruksi. Dalam prinsip *privity* dalam Pasal 1340 BW membawa implikasi bahwa subkontraktor tidak dapat secara langsung menuntut kepada pengguna barang/jasa sekalipun terjadinya subkontrak atas persetujuan pengguna barang/jasa. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Kata Kunci : Pemberdayaan, UMKM, Subkontrak, Pekerjaan Konstruksi

ABSTRACT

Providers of goods/services in the procurement of government goods/services, especially construction service works, are allowed to transfer some of their work to other parties (subcontractors) with the approval of goods/service users. The reason for the transfer of part of the work owned by the main service provider / contractor is because the job requires special expertise (specialist), in addition to meeting the requirements and standards of complex construction work. This form of job transfer is pursued through a subcontracting mechanism. The transfer of work is preferably given to micro, small and medium enterprises or companies on a smaller scale than the main contractor. The aim is that MSMEs can participate and improve their ability to procure government goods / services, especially in construction works. In the principle of privity in Article 1340 BW carries the implication that the subcontractor cannot directly sue the user of the goods / services even if the subcontract is agreed upon by the user of the goods / service. Hopefully this thesis can be useful reading and add insight to the readers

Keywords: *Empowerment, MSMEs, Subcontracting, Construction Work*